



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum tentang Tinjauan Yuridis	17
B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Pemerintah	18
1. Pengertian Peraturan Pemerintah	18
2. Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah	19
C. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah	21
1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah	21
2. Jenis-jenis Pejabat Pembuat Akta Tanah	28



3.	Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah	28
D.	Tinjauan Umum Tentang Perluasan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah	32
BAB III METODE PENELITIAN		39
A.	Jenis dan Sifat Penelitian	39
1.	Jenis Penelitian	39
2.	Sifat Penelitian	40
B.	Bahan Penelitian	41
C.	Subjek Penelitian	44
D.	Cara dan Alat Pengumpulan Data	44
1.	Cara Pengumpulan Data	44
2.	Alat Pengumpulan Data	45
E.	Jalannya Penelitian	46
F.	Analisis Hasil Penelitian	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		48
A.	Dasar pemikiran dirubahnya daerah kerja PPAT dari kabupaten atau kota menjadi satu provinsi berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016	48
B.	Kendala-kendala yang mungkin terjadi jika ketentuan perluasan daerah kerja PPAT Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 dilaksanakan	67



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

TINJAUAN YURIDIS PASAL 12 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG
PERLUASAN DAERAH KERJA

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SALMA VALENTINA SIWI, Dr. Agus Sudaryanto, S.H., M.Si.

Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 77

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA